



PUSAT KAJIAN ANGGARAN  
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

# TANTANGAN PEMBANGUNAN SMELTER



: @Puskajianggaran



: @Puskajianggaran



: [www.puskajianggaran.dpr.go.id](http://www.puskajianggaran.dpr.go.id)

Penulis : SKR



Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa pemegang izin pertambangan wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. Pemerintah mendorong perusahaan pertambangan mineral dalam pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) di dalam negeri, sehingga mineral yang dihasilkan oleh perusahaan pertambangan mineral dapat diolah dan dimurnikan di dalam negeri.

Untuk mendukung hilirisasi mineral, pembangunan smelter hingga tahun 2019 sebanyak 17 smelter yang sudah dibangun, tahun 2020 sebanyak 19 smelter yang sudah dibangun, tahun 2021 direncanakan 4 tambahan smelter, sehingga jumlah smelter menjadi 23 unit pada bulan Juli 2021. Dalam 5 tahun ke depan akan dibangun 31 smelter di beberapa wilayah di Indonesia sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

## PENCAPAIAN SMELTER



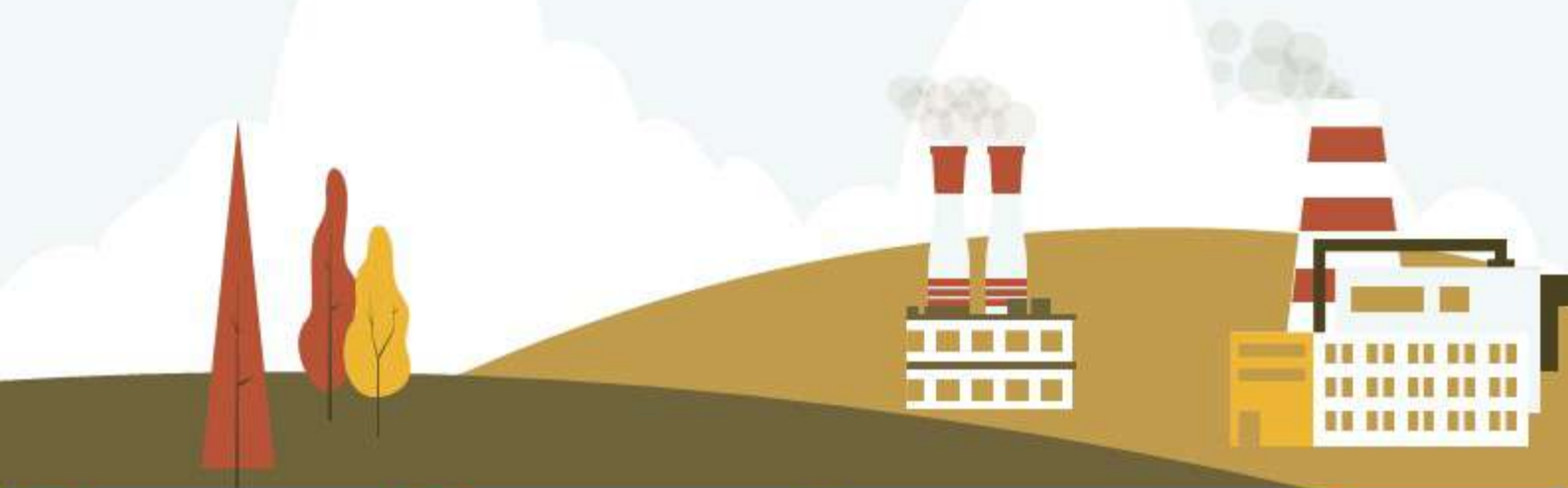
Sumber: Laporan Kinerja, Ditjen Minerba





## Tantangan Dalam Pembangunan Smelter

- 1 Belum mengetahui cara memperkuat ekspor dan substitusi impor (barang industry) dengan produk akhir mineral untuk mengurangi neraca transaksi berjalan atau *current account deficit*
- 2 Banyaknya perizinan yang harus ditempuh untuk membangun smelter, hambatan perizinan dalam alih fungsi lahan serta masih adanya dua perizinan dari Izin Usaha Pertambangan Operasi Khusus (IUP OPK) dan Izin Usaha Industri (IUI)
- 3 Kurangnya stok bahan baku yang menyebabkan beberapa smelter yang sudah dibangun berhenti, terutama smelter nikel
- 4 Masih terbatasnya insentif untuk investasi smelter yang ada saat ini. Diperlukan insentif yang dapat menstimulasi dan menjamin dalam rangka pembangunan fasilitas pengolahan atau pemurnian yang berkelanjutan.
- 5 Ketahanan cadangan nikel di Indonesia makin berkurang seiring dengan semakin bertambahnya smelter nikel yang selesai dibangun





## Alternatif Kebijakan

- 1 Menaikkan ekspor, hilirisasi hasil tambang bisa meningkatkan penciptaan lapangan kerja juga berpeluang mendorong neraca perdagangan surplus dan mengurangi defisit transaksi berjalan. Hilirisasi hasil tambang bisa mengurangi impor. Sebab, barang jadi atau setengah jadi hasil hilirisasi menjadi substitusi impor. Neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan yang positif akan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
- 2 Mengintegrasikan prosedur perizinan di satu harmonisasi perizinan (IUP Operasi Produksi khusus Pengolahan Pemurnian vs Izin Usaha Industri) Kementerian ESDM dan Kemenperin yang difasilitasi Kemenko Perekonomian
- 3 Pemerintah dapat melakukan peluang yang terbuka di masa depan melalui penciptaan *value added product* yaitu dengan melakukan produksi bahan-bahan tambang mineral menjadi produk akhir serta membangun pusat-pusat pertambangan beserta produk akhirnya
- 4 Mendorong kemudahan pada aspek nonfiskal seperti perizinan berusaha, lokasi penanaman modal, penyediaan infrastruktur energi yang searah dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 5 Pemerintah perlu melakukan pengawasan terhadap perhitungan sumber daya dalam industri nikel dari hulu sampai hilir guna memastikan ketersediaan pasokan dan cadangan yang ada dari hulu

